



2016, Tarif Objek Wisata Naik

Badung Akan Revisi Perda 25/2011

MANGUPURA - Meski sudah mendapat pemasukan triliunan rupiah dari pajak hotel dan restoran (PHR), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tetap ingin menaikkan tarif masuk objek wisata. Bahkan, telah mendapat persetujuan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung 25/ 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Ketua Pansus I Nyoman Ardana mengungkapkan, perubahan tersebut akan dimulai 1 Januari 2016 mendatang. Hal itu dilakukan agar perubahan tersebut dapat disosialisasikan dalam waktu yang cukup. Ardana berharap ada sosialisasi kepada travel agen maupun *stakeholder* yang lainnya yang membidangi pariwisata.

Menurut Ardana, peningkatan tarif retribusi tersebut tidak hanya untuk mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semata, melainkan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas penunjang di objek wisata tersebut. Seperti fasilitas toilet dan lahan parkir. "Peningkatan ini juga harus diimbangi dengan kualitas objek wisata tersebut agar tetap terjaga. Baik kebersihan maupun kenyamanan wisatawan," terang Ardana di gedung Dewan, kemarin (27/3).

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, telah disepakati penambahan dua objek wisata baru. Yakni; Pantai Pandawa dan Pantai Labuan Sait. Sebab, sebelumnya kedua objek wisata tersebut dikelola desa adat. (san/djo).

Kenaikan Tarif Objek Wisata di Badung

1. Dasarnya, Mengubah Perda 25/2011 untuk Menaikkan objek wisata. Diantaranya; Sangeh, Taman Ayun, Wisata Uluwatu, dan air terjun Nungnung.
2. Taman Ayun; dewasa manca negara Rp 20 ribu per orang dari sebelumnya Rp 15 ribu. Untuk domestik tidak mengalami perubahan, Rp 10 ribu. Anak-anak tidak naik; domestik Rp 5.000 dan mancanegara Rp 10 ribu.
3. Objek Wisata Uluwatu, dewasa domestik dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu, mancanegara dari Rp 20 ribu menjadi Rp 30 ribu, anak-anak domestik dari Rp 5.000 menjadi Rp 10 ribu, dan mancanegara dari Rp 10 ribu menjadi Rp 20 ribu.

GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 32



INFRASTRUKTUR



WAYAN PUTRA/RADAR BALI

PERLANCAR EKONOMI: Bupati Klungkung Nyoman Suwirta resmikan jalur Dusun Pulagan-Tulad, Sabtu lalu (28/3).

Klungkung Bangun Akses Pulagan-Tulad

SEMARAPURA - Infrastruktur jalan masih menjadi salah satu kendala di Nusa Penida, Klungkung. Bahkan sebagian besar akses jalan di daerah ini rusak berat. Makanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung membangun akses jalan sepanjang 1.115 meter dengan lebar 4 meter yang menghubungkan Dusun Pulagan dengan Dusun Tulad.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Sabtu lalu (28/3) meresmikan proyek tersebut. Menurut Anom Adnyana, kegiatan ini juga dalam upaya menekan angka pengangguran di Nusa Penida. Selain itu juga untuk memupuk rasa gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. "Proyek ini juga bersifat stimulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Sabtu lalu (28/3), saat meresmikan proyek ini.

Anggaran untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Klungkung 2015 sebesar Rp 286,6 juta. (tra/djo)

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 25



Mr. Kim Masih Terima Duit

Kasus Korupsi Pajak Ocean

- Kejari Denpasar sudah menetapkan Kim Chang Citul (Mr. Kim), pemilik Hotel Ocean Blue. Sudah beberapa kali dipanggil Kejari Denpasar, namun Mr. Kim tak pernah datang. Dia dikabarkan keburu kabur ke Korea Selatan.
- Meski sudah berada di Korea Selatan, Mr. Kim diduga masih mengendalikan dan menerima keuntungan dari Hotel Ocean Blue.
- Melihat situasi itu, Kejari Denpasar, Immanuel Zebua berusaha menggunakan instrumen dari posisi Kejari, yang dipakai juga pengacara negara urusan perpajakan.



Tersangka Korupsi Pajak Ocean Blue

DENPASAR - Tersangka kasus korupsi pajak, Kim Chang Citul yang keburu "pulang kampung" ke Korea Selatan ternyata masih mengendalikan Hotel Ocean Blue. Hal itu diungkapkan Kejari Denpasar Immanuel Zebua. Untuk itu, dia berusaha mencari cara untuk menuntaskan kasus "warisan" para pendahulunya tersebut.

Immanuel Zebua mengatakan, timnya masih terus bekerja atas kasus ini. Namun beberapa

hambatan muncul. Pemanggilan atas tersangka Mr Kim belum juga berhasil. "Terus dilakukan pemanggilan, namun belum membuahkan hasil. Lantaran tidak pernah datang tersangkanya," ujar Zebua beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan akan mencari format baru atas kasus ini. Misalnya menelusuri aktivitas hotel saat ini. Karena ada indikasi terkait dengan permainan pajak Hotel dan Restoran (PHR) masih kacau di Ocean Blue. Bahkan indikasinya, keuntungan dari hotel ini mengalir ke Kim yang berada di Korea Selatan ■

► Baca Mr.Kim... Hal 31

Edisi : Senin, 30 Maret 2015

Hal : 21 dan 31



Sambungan

Kaji Penutupan Ocean Blue

■ MR. KIM...

Sambungan dari hal 21

"Seperti apa format permainannya (masih ditelusuri), lantaran ada info dari Korea tersangkanya tetap mengendalikan dan keuntungannya masuk ke tersangka, mengalir dari Bali," ungkapnyanya. Dia mengaku akan berusaha

menggunakan instrumen dari posisi Kejari, yang dipakai juga pengacara negara urusan perpajakan. Misalnya seperti apa? "Misalnya coba dengan pendekatan - pendekatan, dan menelusuri aktivitasnya dan mendalami kondisi hotel," lanjutnya.

Dia juga mengatakan, jika memang masih ada penyimpangan

pajak di Ocean Blue bisa juga nanti aktivitas hotelnya yang ditutup. Termasuk mencari pihak - pihak lain, yang berperan membantu dalam dugaan korupsi ini. "Pola penutupan atas hotel tersebut juga masih dialami. Intinya kami ingin menuntaskan masalah ini, dengan segala permasalahan yang muncul," pungkasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini sudah pemberkasan. Kajari sebelumnya Jaya Kesuma mengatakan tersangka Kim sudah dipanggil. Bahkan sempat berjanji untuk melibatkan Interpol untuk mencari tersangka di Korea Selatan.

Pemeriksaan saksi terakhir, ada 7 orang. Tiga saksi yang pertama

diperiksa adalah pihak Ocean Blue atau karyawan Ocean Blue, Gde Putra Mahendra. Saksi kedua dihadirkan dari bagian Penagihan Travel Gajah Bali Wisata yaitu Natalia Marlina dan saksi ketiga adalah dari Travel TMS Komang Arya. Sedangkan terkait dengan tunggakan pajak, saksi pegawai Ocean Blue mengakui. Namun pembayaran semua atas persetujuan tersangka orang Korea Selatan

tan bernama Kim Chang Citul.

Dilanjutkan kemudian memeriksa empat saksi pada hari berikutnya, tiga dari Dispenda Badung. Lebih lanjut juga dijelaskan, bahwa Ocean Blue pernah menyetor dua kali yaitu Rp 150 juta sampai Rp 200 juta. Selanjutnya malah sama sekali tidak membayar, sehingga menumpuk sampai Rp 10 miliar.

Kejari Denpasar sebenarnya

mengusut beberapa hotel namun Ocean Blue nilainya paling tinggi. Kajari Denpasar sebelumnya Freddy Runtu sempat membeberkan, hotel - hotel yang mengkorupsi pajak. Beberapa hotel itu adalah Ocean Blue Hotel senilai Rp 10 miliar, Ramadha Resort Benoa Rp 6 miliar, Sandhi Pala Hotel Rp 4 miliar dan Bali Intercontinental Resort Rp 3 miliar. (art/yes)